

jogja
Istimewa



PERUBAHAN
RENSTRA
2017-2022

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

KATA PENGANTAR

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menindaklanjuti dengan menyusun Dokumen Perubahan Renstra SKPD Tahun 2017-2022. Penyusunan Perubahan Renstra ini telah mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan atas Renstra ini merupakan dokumen yang sangat penting, yang akan digunakan sebagai instrumen perencanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan sebagai bentuk implementasi asas akuntabilitas kinerja.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran, dan saran dalam penyusunan Perubahan Renstra ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 dapat meningkatkan kinerja, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan terpadu.

Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

Yogyakarta, 14 Juni 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Ir. R. Sutarto, MP

NIP. 19601001 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-8
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	3-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-12
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	3-13
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1 Strategi	5-1
5.2 Arah Kebijakan	5-1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7-1
BAB 8 PENUTUP	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	2-128
Tabel 2-2 Capaian IKLH DIY tahun 2017, 2018 dan capaian IKLH Nasional 2017.....	2-9
Tabel 2-3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Urusan Lingkungan Hidup	2-12
Tabel 2-4 Nilai Produksi Sub Sektor Kehutanan Tahun 2017-2018 (Rp).....	2-13
Tabel 2-5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Urusan Kehutanan.....	2-15
Tabel 2-6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2-16
Tabel 3-1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.....	3-1
Tabel 3-2 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017 – 2022	3-4
Tabel 3-3 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3-7
Tabel 3-4 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3-10
Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	4-2
Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	5-3
Tabel 6-1 Persandingan Nama Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2020	6-1
Tabel 6-2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	6-44
Tabel 6-3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sumber Dana Keistimewaan DIY Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	6-65

Tabel 6-4 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sumber Dana DAK Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 6-66

Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 7-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 2-3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: Kemana pelayanan OPD akan di arahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra di tahun 2019 atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan upaya penyesuaian dengan dinamika pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*) dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di DIY hingga tahun 2022 mendatang.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta ini secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, peluang dan tantangan, dan untuk menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk jangka 2017-2022 Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan DIY memuat telaah atas rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai rujukan atas kebijakan nasional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di DIY serta telaah atas rencana tata ruang, dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sebagai rujukan penggunaan ruang wilayah dan rencana pengelolaan hutan di tingkat provinsi. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY selanjutnya menjadi pedoman dan menjadi rujukan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SPKD setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2017-2022, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2017-2022 disusun untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Program dan Kegiatan SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 bertujuan untuk,

- 1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam arah kebijakan dan

program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan hingga Tahun 2022 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran dan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Mengakomodir adanya redesain kelembagaan yang menyesuaikan dengan dinamika isu-isu pembangunan bidang sarana dan prasarana dalam rencana pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan tahun 2022
- 3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- 4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja dilingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
- III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan ketugasannya diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi dalam bidang lingkungan hidup adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

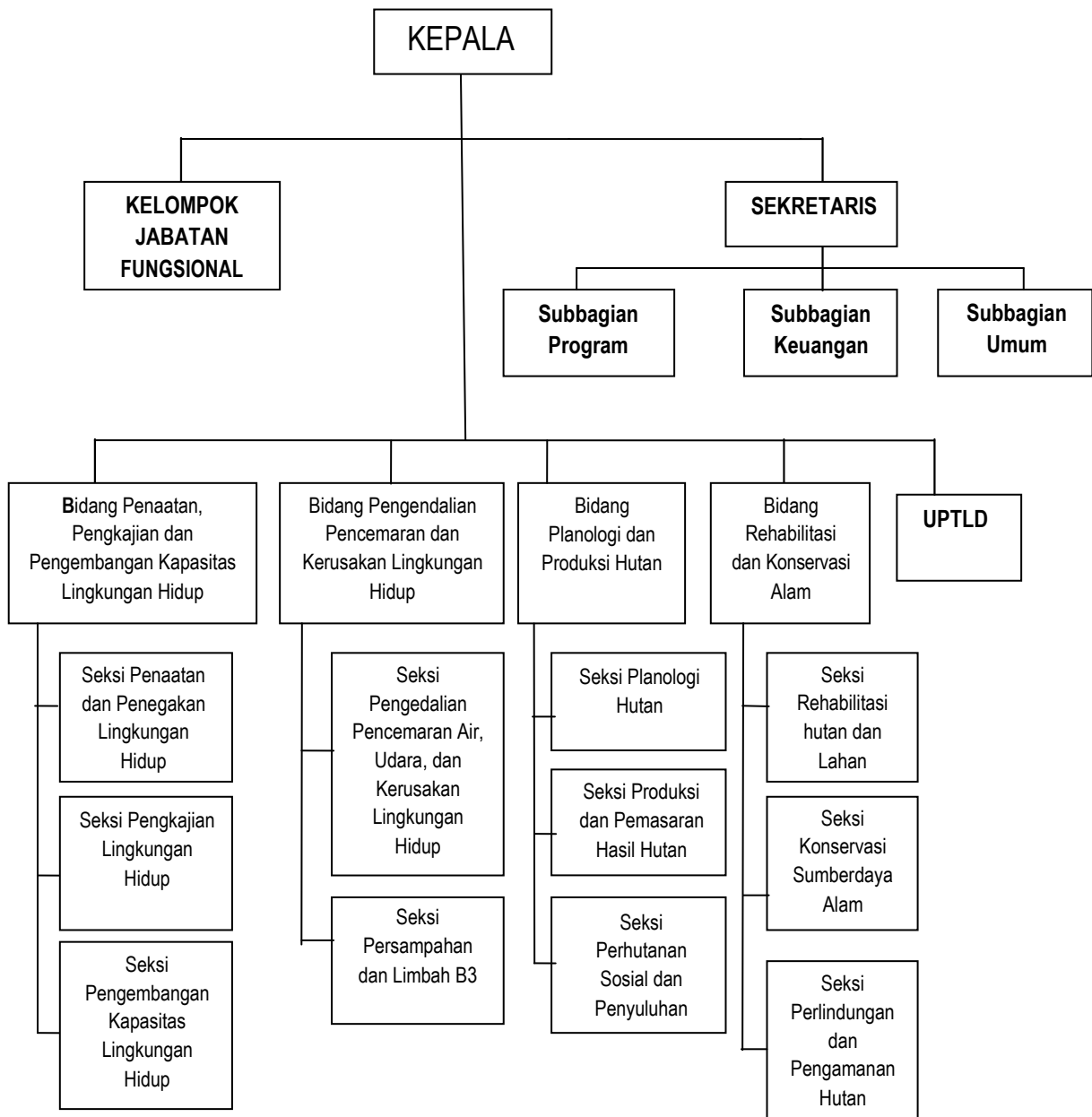
Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi dalam :

1. penyusunan program dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
4. pembinaan pengendalian lingkungan hidup;
5. pengelolaan keanekaragaman hayati;
6. pembinaan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
7. pengelolaan sampah di TPA/TPST regional;
8. pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pengaduan dibidang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP Lingkungan Hidup);

9. penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan penataan lingkungan;
10. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
11. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
12. pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
13. pelaksanaan keplanologian, produksi hutan dan pemasarannya;
14. pelaksanaan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan;
15. pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan;
16. fasilitasi rehabilitasi dan pemanfaatan lahan di tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG) melalui pengembangan kehutanan;
17. pengelolaan kawasan hutan;
18. pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara;
19. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kehutanan;
20. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
21. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didistribusikan ke seluruh unit kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2-1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang terdiri dari 4 bidang dan 1 bagian, serta 1 fungsional tertentu. Struktur tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bergerak dalam urusan kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semua program dan kegiatan telah tertampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/bagian dalam mencapai target kinerja organisasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu:

1. Balai Laboratorium Lingkungan

Balai Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan. Untuk melaksanakan tugasnya Balai Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi dalam :

- a. Penyusunan program Balai;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
- c. Pelaksanaan pengendali mutu;
- d. Pelaksanaan pengujian;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Susunan organisasi Balai Laboratorium Lingkungan terdiri atas : Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pengendali Mutu; Seksi Pengujian; dan Jabatan Fungsional.

2. Balai Pengelolaan Sampah

Balai Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Piyungan (ton/hari). Untuk melaksanakan tugasnya Balai Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi dalam :

- a. Penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Sampah;
- b. Pelaksanaan penyusunan standard operasional prosedur pengelolaan sampah;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan;
- e. Pelaksanaan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan akhir sampah;
- g. Pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi UPT.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Sampah terdiri dari : Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan; dan Seksi Pengolaha dan Pemrosesan Akhir.

3. Balai Perbenihan Kehutanan

Balai Perbenihan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas bidang perbenihan tanaman kehutanan untuk meningkatkan produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang). Untuk melaksanakan tugasnya Balai Perbenihan Kehutanan mempunyai fungsi dalam :

- a. Penyusunan program Balai;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
- c. Pelaksanaan pengembangan perbenihan;
- d. Pelaksanaan sertifikasi benih kehutanan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi UPT.

Susunan organisasi Balai Perbenihan Kehutanan terdiri atas : Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pengembangan Perbenihan; Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan; dan Jabatan Fungsional.

4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk meningkatkan rasio pemanfaatan sumber daya hutan. Untuk melaksanakan tugasnya Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta mempunyai fungsi dalam :

- a. Penyusunan program kerja Balai;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
- c. Pelaksanaan perencanaan, reboisasi, pengamanan dan perlindungan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta terdiri atas : Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan reboisasi; Seksi Pemanfaatan Hutan; dan Jabatan Fungsional.

5. Balai Taman Hutan Raya Bunder

Balai Taman Hutan Raya mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder untuk meningkatkan persentase hutan konservasi terkelola. Untuk melaksanakan tugasnya Balai Taman Hutan Raya Bunder mempunyai fungsi dalam :

- a. Penyusunan program kerja Balai;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan;
- c. Perencanaan dan restorasi hutan wilayah kerja Balai;
- d. Pemanfaatan hutan wilayah kerja Balai;
- e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya Bunder terdiri atas : Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Restorasi; Seksi Pemanfaatan; dan Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki 325 orang pegawai. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki 49 pejabat fungsional tertentu yaitu Polisi Kehutanan sebanyak 30 orang, Penyuluh Kehutanan sebanyak 10 orang, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sebanyak 5 orang, Pengawas Lingkungan sebanyak 3 orang dan 1 orang Pengendali Dampak Lingkungan. Kondisi SDM Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) Pendidikan Terakhir S3 | : 0 orang |
| 2) Pendidikan Terakhir S2 | : 35 orang |
| 3) Pendidikan Terakhir S1 | : 118 orang |
| 4) Pendidikan Terakhir D4 | : 14 orang |
| 5) Pendidikan Terakhir D3 | : 7 orang |
| 6) Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat | : 115 orang |
| 7) Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat | : 26 orang |
| 8) Pendidikan Terakhir SD/Sederajat | : 10 orang |

Kondisi pegawai Menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

1) Pembina Utama Madya (IV/d)	: 1 orang
2) Pembina Utama Muda (IV/c)	: 0 orang
3) Pembina Tingkat I (IV/b)	: 10 orang
4) Pembina (IV/a)	: 14 orang
5) Penata Tk I (III/d)	: 59 orang
6) Penata (III/c)	: 50 orang
7) Penata Muda Tk I (III/b)	: 65 orang
8) Penata Muda (III/a)	: 33 orang
9) Pengatur Tk I (II/d)	: 37 orang
10) Pengatur (II/c)	: 22 orang
11) Pengatur Muda Tk I (II/b)	: 11 orang
12) Pengatur Muda (II/a)	: 12 orang
13) Juru Tingkat I (I/d)	: 3 orang
14) Juru (I/c)	: 6 orang
15) Juru Muda Tingkat I (I/b)	: 2 orang
16) Juru Muda (I/a)	: 0 orang

(data kepegawaian DLHK per April 2019)

2.2.2. Sarana dan Prasarana Instansi

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun UPTD yang tersebar di 5 kabupaten/ kota, pabrik minyak kayu putih, kantor RPH, BDH, serta laboratorium. Selain itu juga tersedia kendaraan roda 2, 4, dan 6, alat bengkel, kebun, jalan hutan, alat kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan komunikasi. Secara umum, kondisi sarpras belum semuanya terpenuhi, misalnya belum adanya gedung laboratorium lingkungan yang memadai serta ada beberapa sarpras yang membutuhkan perawatan dan perbaikan. Kondisi sarpras yang terbatas ini berusaha dioptimalkan sehingga tidak mengganggu pekerjaan secara signifikan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKKI	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke -				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup			88,56	91,47	94,39	97,02	100	93,26					105,3				
2	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY			734.713 juta rupiah	742.060 juta rupiah	749.480 juta rupiah	756.975 juta rupiah	764,545 juta rupiah	1.020.262,40 juta rupiah					138,86				

2.3.1. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel di atas, target kinerja tahun 2018 adalah 88,56% sementara realisasi kinerjanya adalah 93,26%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tahun 2018 berhasil dipenuhi. Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 6,74%.

Tabel 2-2 Capaian IKLH DIY tahun 2017, 2018 dan capaian IKLH Nasional 2017

	IKA	IKU	IKTL	IKLH
Nasional 2017	58,68	87,03	56,88	66,46
DIY 2017	33,9	88,08	35,6	50,83
DIY 2018	40,25	84,24	60,86	61,69

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa secara umum nilai indeks kualitas lingkungan di DIY selalu di bawah nilai indeks nasional. Meskipun pada tahun 2017 IKU DIY melebihi nilai IKU nasional, pada tahun 2018, nilai IKU DIY turun sebanyak 3,88 menjadi di bawah nilai IKU nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada masing-masing Indeks adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas air (IKA)

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, IKA mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas air sungai dari parameter-parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)* dan bakteri Coliform. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh :

- Peningkatan kesadaran masyarakat di sekitar sungai dengan adanya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan di 5 Kabupaten/Kota se DIY;
- Gerakan bersih sungai yang melibatkan masyarakat di sekitar sungai;
- Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup para pelaku usaha/kegiatan melalui pembangunan instalasi pengelolaan air limbah;
- Dukungan Pemerintah DIY dalam program penataan permukiman yang menghadap sungai (sungai sebagai halaman muka) dengan aturan *Madep, Mundur, Munggah*.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara hasil pemantauan dengan *passive sampler*, diperoleh Indeks Kualitas Udara sebesar 84,24. Sedangkan target dalam RPJMD 87,06, sehingga realisasi IKU tidak mencapai

angka target. Namun walaupun demikian, nilai IKU 84,24 dikategorikan masih sangat baik. Penurunan IKU dari 2017 ke 2018 kemungkinan disebabkan oleh pencemaran udara yang bersumber dari transportasi, yaitu penambahan kendaraan yang cukup signifikan selama tahun 2017-2018 di DIY. Selain itu, pencemaran dari industri yang semakin banyak juga berpengaruh terhadap kualitas udara.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Penghitungan peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan dengan pengumpulan data luasan tutupan vegetasi kemudian divalidasi dengan pengukuran di lapangan dan/atau interpretasi citra. Tutupan vegetasi yang dihitung meliputi hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, dan kebun campuran. Jika dibandingkan IKTL tahun 2017, nilai IKTL tahun 2018 meningkat sangat signifikan. Hal ini terkait dengan penambahan data dari instansi terkait yang turut bertanggungjawab menginventarisasi data tutupan vegetasi di DIY. Selain dari itu, faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai IKTL antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung penghijauan, dan faktor cuaca.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Tingginya alih fungsi lahan, dari lahan terbuka/bervegetasi menjadi lahan terbangun
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah, baik di tingkat regional maupun lokal Kabupaten/Kota
3. Polusi udara di perkotaan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan masih terbatasnya alat transportasi publik

Solusi/Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan pengawasan dalam pemberian ijin pelepasan lahan dan pembuatan kebijakan lahan untuk pertanian abadi.
2. Peningkatan pengelolaan sampah dengan teknologi di TPA Piyungan dan peningkatan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
3. Kebijakan pajak progressif untuk kepemilikan kendaraan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik.

Tabel 2-3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.160.634.200	n/a	n/a	n/a	n/a	1.083.075.788	n/a	n/a	n/a	n/a	93,32	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	714.776.000	n/a	n/a	n/a	n/a	585.908.617	n/a	n/a	n/a	n/a	81,97	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	787.456.775	n/a	n/a	n/a	n/a	778.260.634	n/a	n/a	n/a	n/a	98,83	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	3.011.987.650	n/a	n/a	n/a	n/a	2.777.031.996	n/a	n/a	n/a	n/a	92,20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PENGGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	2.140.299.050	n/a	n/a	n/a	n/a	1.918.607.575	n/a	n/a	n/a	n/a	89,64	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	4.166.366.850	n/a	n/a	n/a	n/a	3.919.580.404	n/a	n/a	n/a	n/a	94,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI	13.176.012.900	n/a	n/a	n/a	n/a	4.848.586.832	n/a	n/a	n/a	n/a	36,80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	334.200.000	n/a	n/a	n/a	n/a	299.241.570	n/a	n/a	n/a	n/a	89,54	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
JUMLAH	25.491.733.425	n/a	n/a	n/a	n/a	16.210.293.416	n/a	n/a	n/a	n/a	63,59	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Pelaksanaan renstra untuk urusan lingkungan hidup periode 2017-2022 sampai dengan tahun 2018 secara umum dapat dikatakan baik. Dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 25.491.733.425,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.210.293.416,- atau sebesar 63,59 %.

2.3.2. Bidang Urusan Kehutanan

Rencana Strategis untuk urusan kehutanan periode 2017-2022 hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY dengan meta indikator nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK). Berdasarkan hasil analisis BPS tahun 2018, angka PDRB sub sektor kehutanan berada di angka 1.020.262,40 juta rupiah. Realisasi tersebut telah melebihi target dengan prosentase 138,86 %.

Jika dilihat dari nilai produksi kehutanan tahun 2018 di DIY yang berasal dari hutan negara yang notabene juga berkontribusi terhadap nilai PDRB sub sektor kehutanan, maka pada tahun 2018 produksinya meningkat jika dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2-4 Nilai Produksi Sub Sektor Kehutanan Tahun 2017-2018 (Rp)

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	2	3	4
1.	Produksi minyak kayu putih	8.420.859.700	11.521.371.674
2.	Produksi kayu	661.161.046	1.063.086.074
3.	Pengelolaan hutan Mangunan	1.962.831.125	2.260.603.000
	Jumlah	11.044.851.871	14.845.060.748

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Nilai produksi dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 3.800.208.877,-. Semua komoditas penyumbang produksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Kontribusi terbesar berasal dari produksi minyak kayu putih yang meningkat sebesar Rp. 3.100.511.974,- dibandingkan tahun 2017.

Produksi hasil hutan kayu juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Peningkatan sebesar Rp. 401.925.028,- berasal dari peningkatan jumlah produksi kayu jati dan rimba lainnya. Selain dari tebangan yang direncanakan, kenaikan jumlah produksi juga berasal dari hasil penjualan barang curian yang dilelangkan.

Jasa lingkungan berupa wisata alam yang berlokasi di hutan pinus mangunan juga mengalami peningkatan seiring dengan tren wisata alam yang juga meningkat peminatnya. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari yang sebelumnya

sebanyak 1.870.554 orang selama tahun 2017 menjadi 2.168.606 orang pada tahun 2018.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam ketercapaian sasaran antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kondisi tegakan yang mayoritas berupa tegakan bertumbuhan kurang sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan dalam hal ini untuk produksi kayu dan minyak kayu putih tidak bisa dilakukan secara optimal
2. Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal
3. Pengelolaan potensi hutan rakyat yang belum optimal

Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha diselesaikan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menambah jumlah tanaman dalam tegakan sehingga jumlah tanaman menjadi normal dan dapat dimanfaatkan secara optimal
2. Pemanfaatan sumberdaya hutan lainnya yang berupa jasa atau pemanfaatan lainnya sehingga tidak terkendala pada kondisi tanaman. Salah satu pemanfaatan jasa yang dapat dijadikan pertimbangan adalah pengembangan jasa wisata alam pada hutan produksi dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada di dalam kawasan hutan yang dapat dilaksanakan secara swakelola ataupun bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan maupun pihak swasta. Namun dalam pengelolaannya seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip ekowisata
3. Identifikasi potensi hutan rakyat dan mencari alternative pengelolaan hutan rakyat untuk lebih mengoptimalkan potensinya.

Tabel 2-5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Urusan Kehutanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.343.07 7.400,00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.112.12 1.666,00	n/a	n/a	n/a	n/a	93,09	n/a	n/a	n/a	n/a		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.423.32 7.002,00	n/a	n/a	n/a	n/a	2.152.91 3.011,00	n/a	n/a	n/a	n/a	88,84	n/a	n/a	n/a	n/a		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	210.350. 000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	162.906. 830,00	n/a	n/a	n/a	n/a	77,45	n/a	n/a	n/a	n/a		
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN	4.459.61 7.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	4.245.92 7.330,00	n/a	n/a	n/a	n/a	95,21	n/a	n/a	n/a	n/a		
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN	658.485. 000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	638.199. 000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	96,92	n/a	n/a	n/a	n/a		
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN	5.898.14 8.577,00	n/a	n/a	n/a	n/a	5.469.58 8.911,00	n/a	n/a	n/a	n/a	92,73	n/a	n/a	n/a	n/a		
JUMLAH	16.993.0 04.979					15.781.6 56.748					92,87						

Pelaksanaan renstra untuk urusan kehutanan periode 2017-2022 sampai dengan tahun 2018 secara umum dapat dikatakan baik. Dari target keuangan yang ditetapkan sebesar Rp. 16.993.004.979,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.781.656.748,- atau sebesar 92,87 %.

Pengelolaan anggaran pada pelaksanaan renstra periode 2017-2022 sampai dengan tahun 2018 didukung oleh ketersediaan SDM pengelola yang memadai, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan utama dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan dimana perencanaan yang baik tanpa didukung pelaksanaan yang baik tidak akan mewujudkan realisasi anggaran yang tinggi. Selain itu perencanaan kebutuhan anggaran memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam upaya mencapai keluaran dan hasil yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan efektifitas penggunaan anggaran. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan kehutanan mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Tabel 2-6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tantangan	Peluang
Urusan Lingkungan Hidup	
a. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan b. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air c. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan d. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana. e. Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air	a. Permen LH Nomor 5 Tahun 2011 melalui pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media pemaksa agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip – prinsip pengelolaan lingkungan hidup b. Adanya komitmen pemkab/pemkot di wilayah DIY dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayahnya c. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan d. Kondisi geografis DIY yang unik dan statusnya sebagai kota pelajar merupakan

Tantangan	Peluang
<p>laut, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca</p> <p>f. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan</p> <p>g. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah</p> <p>h. Penurunan indeks kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.</p> <p>i. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah.</p>	<p>peluang besar bagi para akademisi untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mitigasi dan antisipasi bencana alam</p> <p>e. Pergub DIY Nomor 51 Tahun 2012 mengenai Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK merupakan komitmen Pemda DIY dalam mitigasi perubahan iklim</p> <p>f. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan budaya. Hal ini menjadi peluang bagi Pemda DIY untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup</p> <p>g. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadi payung hukum pemerintah daerah dalam pencegahan penurunan kualitas dan kuantitas air</p> <p>h. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2011 yaitu pemberlakuan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya roda 4</p> <p>i. Tingginya antusiasme warga masyarakat dalam kreasi daur ulang sampah dan limbah sangat tinggi, contohnya pembuatan <i>ecobrick</i>/bata ramah lingkungan</p>
Urusan Kehutanan	
<p>a. Kebutuhan minimal luas kawasan hutan belum terpenuhi sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 sebesar 30%</p> <p>b. Belum optimalnya peran aktif masyarakat, pemerintah desa, dan para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), potensi wisata dan jasa lingkungan.</p> <p>c. Penyelenggaraan rehabilitasi belum direncanakan secara baik dalam satu kesatuan pengelolaan</p> <p>d. Tingginya tekanan masyarakat desa hutan untuk pemenuhan lahan pertanian, hijauan pakan ternak, kayu bakar, dan kayu pertukangan</p> <p>e. Perlindungan dan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan belum dibangun dalam kerangka yuridis legal formal yang kuat, kejelasan hak dan kewajiban, dan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.</p> <p>f. Pengelolaan hutan rakyat masih dilakukan secara konvensional seperti</p>	<p>a. Pengembangan dan pembangunan hutan hak di lahan-lahan milik atau lahan tanah negara untuk meningkatkan luasan hutan di DIY sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 sebesar 30%</p> <p>b. Pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan seiring lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>c. Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL), serta dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT-RHL)</p> <p>d. Pengembangan/pemanfaatan jasa lingkungan- ekowisata di kawasan hutan negara dan hutan rakyat sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat desa hutan</p> <p>e. Dukungan kebijakan pemerintah pada kegiatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan/atau pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui skema kerjasama/ kemitraan dan</p>

Tantangan	Peluang
<p>belum digunakannya bibit unggul, belum diterapkannya teknik silvikultur sesuai kaidah teknik kehutanan.</p> <p>g. Pemasaran hasil hutan kayu rakyat (<i>market chain</i>) terlalu panjang, dan masih dalam bentuk log/kayu bulat, sehingga petani hutan rakyat tidak menikmati manfaat yang seharusnya dari hasil hutan rakyat</p> <p>h. Kelembagaan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) belum tertata dengan baik yang dapat berpengaruh pada posisi tawar petani hutan rakyat.</p> <p>i. Masih rendahnya kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan terhadap PDRB.</p> <p>j. Tahapan pengelolaan hutan belum dilakukan secara baik berlandaskan pada prinsip “Pengelolaan Hutan Lestari”</p> <p>k. Masa panen kayu yang lama mengakibatkan produktivitas hutan menurun drastis pasca penebangan</p>	<p>perhutanan sosial</p> <p>f. Pengembangan komoditi unggulan setempat berbasis karakteristik lokal seperti nangka, bambu, dan hutan serbaguna dan pengembangan ASDG (Areal Sumber Daya Genetik) melalui penyediaan bibit berkualitas</p> <p>g. Adanya inisiasi untuk pengolahan kayu hasil hutan rakyat menjadi produk setengah jadi (<i>sawmill</i>) atau produk jadi (<i>furniture</i>) seperti di UMHR Wonolestari Bantul</p> <p>h. Adanya pendampingan dari pihak terkait termasuk LSM bagi UMHR dalam meraih sertifikasi, misalnya SLVK dan PHBML untuk menaikkan posisi tawar</p> <p>i. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah melalui kegiatan pemanfaatan HHK/pemanenan Tegakan GNRHL</p> <p>j. Balai KPH Yogyakarta mulai menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan hutan lestari seperti penyusunan rencana pengelolaan hutan, tata hutan hingga tingkat petak, rehabilitasi dan intensifikasi tegakan hutan, perlindungan hutan, konservasi plasma nutfah serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan</p> <p>k. Optimalisasi produktivitas hasil hutan bukan kayu khususnya minyak kayu putih melalui penanaman/ pembongkaran tegakan tanah kosong dan pengkayaan (penambahan jumlah tanaman) untuk perbaikan kondisi tegakan menuju tegakan normal.</p>

Adanya tantangan dan peluang tersebut memerlukan tindak lanjut agar pembangunan kehutanan di D.I Yogyakarta dapat berjalan dan memberikan manfaat optimal. Dari lingkup internal, perlu penambahan sumberdaya manusia di internal Dinas maupun UPTD di bawah Dinas untuk menggantikan petugas lapangan yang purna karya. Berkenaan dengan kompetensi petugas lapangan, perlu dilakukan *capacity building* petugas khususnya penguasaan ilmu teknik kehutanan, kelola lingkungan, dan kelola sosial menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan saat ini.

Penanganan lahan kritis dan pengkayaan tanaman merupakan prioritas yang harus dilaksanakan agar potensi sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain menjadi ancaman, masyarakat sekitar hutan bisa menjadi peluang yang besar dalam pembangunan kehutanan dengan pelibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat ikut mempunyai rasa

memiliki kepentingan terhadap hutan. Dengan adanya rasa ikut memiliki masyarakat akan ikut menjaga dan melestarikan hutan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Selain pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang sudah ada perlu adanya upaya pemanfaatan peluang yang dapat dikembangkan lebih lanjut seperti pemanfaatan hutan untuk hasil non kayu dan jasa lingkungan agar hutan mampu memberikan nilai lebih dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti tercantum dalam Peraturan (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mencatat ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

Tabel 3-1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penurunan Kualitas Lingkungan (air, udara dan lahan)	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	a. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat
	3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di DIY karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penanganannya b. Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan secara kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium. c. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan
	4. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik b. Kondisi hutan yang masih rentan terhadap gangguan c. Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA. b. Pengelolaan TPA yang belum optimal
	6. Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas b. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas
Rendahnya Nilai Produksi Kehutanan	1. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibiran lahan dan/atau okupasi lahan
	2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di DIY belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia c. Kondisi tegakan hutan di Yogyakarta sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal
	3. Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu: **“Terwujudnya Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.”**

- Terwujudnya adalah suatu kondisi yang diharapkan pada 5 tahun ke depan untuk terlaksana (KKBI);
- Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya; KKBI) suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik;
- Kemuliaan adalah hal (keadaan) mulia, keluhuran; keagungan; kehormatan (KKBI). Kemuliaan dalam visi ini dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya : 1) peningkatan kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; 2) peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan; 3) terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi; 4) pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; 5) pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas;
- Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan;
- Manusia Jogja adalah pelaku, sehingga frasa ini merepresentasikan insan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi subyek pembangunan.

Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) masih memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan yang tinggi. Harkat dan martabat kesejahteraan masyarakat menjadi penting untuk ditingkatkan meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia DIY telah berada di ranking tertinggi di Indonesia. Pembangunan di DIY terus diupayakan untuk berkelanjutan dan memiliki pendekatan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia Jogja baik lahir maupun batin. Kesejahteraan ekonomi adalah kesejahteraan fisik yang harus dapat dinikmati oleh pelaku utama yaitu manusianya, sehingga kesejahteraan fisik itu harus diikuti oleh kesejahteraan yang lebih riil yang diterima oleh manusia yang terlibat dalam pembangunan. Manusia Jogja masih memiliki persoalan kesejahteraan dari aspek kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan tingginya angka ketergantungan sebaran pendapatan oleh angkatan kerja, mengingat angka ketergantungan yang cukup tinggi di DIY.

Prioritas pembangunan di DIY 2017-2022 diarahkan pada delapan isu, antara lain: Derajat kualitas SDM; Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat (Indeks Gini dan Angka Kemiskinan); Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan (Pertumbuhan ekonomi, Kualitas LH, Kesesuaian ruang, penataan ruang strategis keistimewaan); Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (Indeks Williamson); Terpelihara dan

Berkembangnya Kebudayaan (Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi); Kapasitas tata kelola pemerintahan (BPK, AKIP); Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan (Capaian sasaran keistimewaan); serta Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa.

3.2.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2022), ditempuh melalui dua misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**
- **Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mengemban Misi 1 RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban, dimaknai sebagai misi yang diembankan upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Misi ke-1 RPJMD DIY 2017 – 2022 memiliki tujuan meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Dengan sasaran meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan yang diindikasikan dari nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

Tabel 3-2 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017 - 2022

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi	Indeks Gini

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Berkeadaban	sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta		masyarakat.	Persentase Angka Kemiskinan
				1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				1.4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
				1.5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
	1.6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Indeks Williamson			
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK
					Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
	2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan			

(Sumber: RPJMD DIY 2017 - 2022)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

3.3.1 Renstra K/L

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan rangkuman langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik. Untuk prioritas pembangunan bidang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dan sasaran strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan LH, meliputi:

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
- b. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran Strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam konteks pembangunan kehutanan di DIY terutama pada tahun 2017 – 2022, kebijakan pembagunan kehutanan di tingkat nasional menjadi

salah satu pedoman yang harus diikuti dan disesuaikan dengan karakteristik atau kekhasan wilayah yang dimiliki oleh DIY. Dalam konteks pembangunan kehutanan untuk diperoleh manfaat yang optimal baik dari sisi perekonomian, sosial dan ekologi maka upaya pengendalian, pelestarian dan pengembangan kawasan hutan terus diupayakan peningkatannya sehingga fungsi sosial, ekonomi dan ekologis hutan diharapkan dapat berperan secara optimal.

Peran hutan rakyat sebagai salah satu bagian dari pembangunan kehutanan memerlukan pendekatan yang berbeda dengan kawasan hutan negara. Untuk peningkatan peran ekonomi perlu dikembangkan pemberdayaan bagi petani dan kelembagaannya, sehingga hutan rakyat menjadi lebih produktif, yang selanjutnya petani memperoleh nilai tambah/pendapatan dari usaha lain non kayu maupun hasil dari tanaman pokok hutan. Oleh sebab itu, pemberdayaan petani hutan diarahkan agar petani dapat meningkatkan produksi kayu yang berkualitas dan menghasilkan produk hutan non kayu yang lebih memadai, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Peran sosial dan ekologi dari hutan rakyat merupakan bagian penting dalam upaya pengkondisian kualitas lingkungan hidup yang layak dan menjamin keberlangsungan kelestarian sumberdaya alam.

Tabel 3-3 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5 – 68,5 pada tahun 2019 b. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan	a. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup b. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan c. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan	a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur DIY mengenai pengelolaan sampah dan limbah c. IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan DIY dalam RPJMD	a. Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan b. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam

No.	Sasaran Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup e. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	DIY 2017 - 2022	pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
2.	Menurunnya frekuensi dan luasan pennebangan liar	Masih banyak ditemui gangguan keamanan hutan dan gangguan perlindungan hutan yang berdampak pada kerusakan tegakan hutan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga masyarakat di sekitar hutan untuk turut berperan serta dalam pengamanan hutan	Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pennebangan liar
3.	Peningkatan kualitas tata kelola a. Berkurangnya kawasan hutan berstatus <i>open access</i> dengan mengembangkan KPHP menjadi 347 unit b. Meningkatnya penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk KPHP dan hutan produksi di bawah IUPHHK-HA	Kurangnya kapasitas SDM dalam tata kelola hutan	Meningkatnya frekuensi pendampingan dalam tata kelola hutan oleh dinas	Masih adanya ego sektoral di sebagian pihak terkait (khususnya antar SKPD di lingkup pemerintah daerah) dalam pendampingan dan pemberdayaan petani hutan rakyat.
4.	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015 - 2019 a. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29 juta m ² b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan menjadi 160 juta m ² c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m ² d. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD 40,37 miliar	Luasan hutan negara di DIY sangat terbatas	a. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah pusat mendorong KPH untuk terus eksis dalam pengelolaan hutan hingga ke tingkat tapak b. Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan	Valuasi keberhasilan pengelolaan hutan dengan hanya mendasarkan pada produksi kayu saja sangat sulit diterapkan di DIY

No.	Sasaran Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			hutan produksi memberikan dampak positif	
5.	<p>Konservasi hutan:</p> <p>a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</p> <p>b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 27,12 juta ha termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove</p> <p>c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan</p> <p>d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati</p>	<p>Perbaiki ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan</p>	<p>Kegiatan – kegiatan bertema pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan</p>	<p>a. Faktor alam seperti perubahan iklim memperparah kebakaran hutan sementara kegiatan rehabilitasi semakin sulit dilakukan karena cuaca yang tidak menentu</p> <p>b. Faktor <i>human eror</i> seperti perburuan liar dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelakunya</p>
6.	<p>Tata kelola hutan:</p> <p>a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 %</p> <p>b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km</p> <p>c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional dan 100 KPHK bukan Taman Nasional (TN)</p> <p>d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)</p>	<p>a. Tingkat kemiskinan di desa-desa hutan masih cukup tinggi</p> <p>b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal</p> <p>c. Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal</p>	<p>Rintisan pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor penguangkit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat memberikan dampak positif</p>	<p>Masih kurangnya keterlibatan pemerintah di level tapak, khususnya pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan seiring dengan penerapan paradigma perhutanan sosial, dan pemberlakuan UU Desa</p>

3.3.2 Telaah Renstra Kabupaten/Kota

Tabel 3-4 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Menengah Renstra Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Kota Yogyakarta				
1.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan 3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	a. Adanya Perwal terkait kebijakan RTH, dan pengelolaan sampah ditingkat kelurahan b. Penataan Kawasan sempadan sungai	a. Pembangunan property yang cukup tinggi dengan dalih peningkatan aktifitas pariwisata b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat			
3.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat			
B Kabupaten Sleman				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	1. Keberadaan institusi akademis yang banyak di Kab Sleman 2. Adanya kebijakan Kawasan pertanian berkelanjutan	1. Peningkatan aktivitas alih fungsi lahan 2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam dalam penentuan kebijakan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat khususnya masalah sanitasi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
3.	Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup			
4.	Meningkatnya pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi			

No.	Sasaran Menengah Renstra Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	Kabupaten Bantul			
1.	Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan “Bantul bebas sampah” oleh Bupati Bantul Potensi pemanfaatan sumber energi terbarukan Dukungan pemerintah terhadap eksistensi bank sampah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan TPST piyungan yang masih belum ideal Fungsi pengawasan lingkungan hidup yang masih belum optimal Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
2.	Peningkatan Luas Tutupan Lahan			
3.	Peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
D	Kabupaten Kulon Progo			
	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi tutupan vegetasi yang masih relative luas termasuk Kawasan mangrove Kebijakan bela dan beli kulon progo yang dapat mendukung penurunan carbon footprint 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya alih fungsi lahan karena aktivitas bandara baru di Kulon Progo Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan Aktivitas penambangan galian C yang kurang terkontrol

No.	Sasaran Menengah Renstra Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		lingkungan hidup		
E	Kabupaten Gunungkidul			
	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi wisata berbasis ecotourism 2. Potensi sumber air bawah tanah 3. Tutupan vegetasi yang cukup baik yang disumbang dari luasan hutan rakyat dan hutan negara 4. Pengembangan pasar ekologi sebagai upaya pemanfaatan lahan bekas tambang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kunjungan wisata di Kab. Gunung Kidul menimbulkan masalah lingkungan baru 2. Timbunan sampah yang belum dikelola dengan baik 3. Penambangan batu kapur di Kawasan karst yang cukup massive

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029 kebijakan pengembangan prasarana lingkungan meliputi sistem penangananan limbah, sampah, drainase disediakan baik di kawasan perkotaan dan pedesaan mulai dari hulu dan hilir serta lintas Kabupaten/Kota pada kawasan strategis. Pembangunan pengelolaan air limbah terpusat untuk area pelayanan kawasan perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu untuk area pelayanan kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul dan pembangunan jaringan drainase di seluruh Kabupaten/Kota.

Untuk pola ruang wilayah DIY meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari : kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam, kawasan suaka margasatwa, dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pendidikan tinggi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan militer dan kepolisian.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk dapat menjaga pelestarian fungsi kawasan lindung mulai dari kawasan hulu sampai hilir agar fungsinya sebagai daerah resapan air tetap terjaga dan konservasi keanekaragaman hayati juga dapat dilestarikan. Di samping itu pengelolaan lingkungan hidup juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan kawasan budi daya agar laju degradasi fungsi lingkungan terkendali. Hal ini mengingat kawasan budidaya merupakan kawasan yang padat dengan berbagai aktifitas pertanian, peternakan, perumahan dan perekonomian.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran tata ruang;

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumpul pasir.

2. Menurunnya fungsi ekologi;

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air

dan erosi tanah berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Selain itu juga terjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, baik yang ada di daratan seperti keragaman tanaman endemik, satwa mamalia, burung, dan serangga maupun kelangsungan hidup terumbu karang, mangrove, dan vegetasi pantai.

3. Meningkatnya pencemaran lingkungan;
Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Dampaknya antara lain terjadinya pencemaran air dan air tanah yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan, serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hal – hal tersebut di atas tentunya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan.
4. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3;
Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan.
5. Aktivitas Penambangan Bahan Galian Golongan C;
Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa penambangan pasir dan batu kapur yang termasuk bahan galian golongan C. Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun, pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan ilegal ini antara lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, pencemaran lingkungan, abrasi dan ablasi.
6. Abrasi dan ablasi;
Abrasi adalah pengikisan tanah oleh gelombang/ arus air yang dipercepat oleh faktor alam dan faktor manusia. Apabila terjadi di wilayah sungai atau DAS, peristiwa ini disebut ablasi. Fenomena abrasi dan ablasi menyebabkan perubahan bentang alam akibat mundurnya garis daratan dari wilayah

perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.

7. Fenomena pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*);
Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.
8. Menguatnya kesadaran publik baik ditingkat lokal, nasional, regional, dan global terhadap isu-isu kelestarian hutan, kepastian legalitas bahan baku kayu yang dapat berdampak pada pemasaran hasil hutan kayu;
9. Pengelolaan hutan lestari yang mencakup kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan. Pengelolaan hutan lestari mencakup pemanfaatan seluruh potensi hutan dan hasil hutan baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa wisata dan jasa lingkungan;
10. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk peningkatan daya dukung ekosistem di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Sesuai tujuan dalam RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 yaitu *Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta*, dan mengacu kepada misi pembangunan DIY yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022 dengan mengacu pada misi dan tujuan Pembangunan DIY di atas yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergi dan efektifitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mengukur ketercapaian sasaran, maka dirumuskan indikator. Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan sinergi dan efektifitas upaya pengendalian pencemaran udara, air, kerusakan lahan dan hutan serta peningkatan tutupan vegetasi yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaram pembangunan bidang lingkungan hidup	88,56	91,47	94,39	97,02	100
2.	Pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB	734.713 juta rupiah	742.060 juta rupiah	749.480 juta rupiah	756.975 juta rupiah	764.545 juta rupiah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah DIY serta tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan maka diperlukan strategi berdasarkan penjabaran dari misi. Upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian dan penataan lingkungan hidup
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Mengembangkan kapasitas lingkungan hidup
4. Mengelola tutupan vegetasi dan konservasi Sumber Daya Alam
5. Melaksanakan pengelolaan persampahan regional
6. Mengembangkan pembibitan kehutanan
7. Melaksanakan perencanaan dan bina usaha kehutanan
8. Mengelola hutan produksi dan hutan lindung
9. Melaksanakan pengelolaan hutan konservasi

5.2 Arah Kebijakan

Secara lebih lanjut, strategi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup DIY dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu
2. Melaksanakan pengkajian lingkungan hidup
3. Mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah
4. Mengelola sampah dan limbah B3
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup
6. Meningkatkan mutu laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan
8. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan
9. Melaksanakan konservasi sumberdaya alam
10. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan
11. Melaksanakan pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampah
12. Mengelola sarana dan prasarana penanganan sampah regional
13. Mengembangkan perbenihan tanaman kehutanan
14. Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih bibit tanaman

15. Mengelola perhutanan sosial
16. Melaksanakan penatausahaan produksi hasil hutan
17. Melaksanakan penataan hutan
18. Melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan
19. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
20. Melaksanakan Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder
21. Mengembangkan pelayanan pemanfaatan Tahura

Secara terperinci terkait dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, dapat dilihat dala table dibawah ini.

Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergi dan efektifitas upaya pengendalian pencemaran udara, air, kerusakan lahan dan hutan serta peningkatan tutupan vegetasi yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	1. Melaksanakan pengkajian dan penataan lingkungan hidup	a. Melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu b. Melaksanakan pengkajian lingkungan hidup
		2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah b. Mengelola sampah dan limbah B3
		3. Mengembangkan kapasitas lingkungan hidup	a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup b. Meningkatkan mutu laboratorium lingkungan c. Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan
		4. Mengelola tutupan vegetasi dan konservasi Sumber Daya Alam	a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan b. Melaksanakan konservasi sumberdaya alam c. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan
		5. Melaksanakan pengelolaan persampahan regional	a. Melaksanakan pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampah b. Mengelola sarana dan prasarana penanganan sampah regional
		6. Mengembangkan pembibitan kehutanan	a. Mengembangkan perbenihan tanaman kehutanan b. Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih bibit tanaman

Mewujudkan tata kelola hutan lestari	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	1. Melaksanakan perencanaan dan bina usaha kehutanan	a. Mengelola perhutanan sosial b. Melaksanakan penatausahaan produksi hasil hutan c. Melakukan penataan hutan
		2. Mengelola hutan produksi dan hutan lindung	a. Melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
		3. Melaksanakan pengelolaan hutan konservasi	a. Melaksanakan Pengelolaan Tahura Bunder b. Mengembangkan pelayanan pemanfaatan Tahura

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perubahan kelembagaan OPD berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membawa konsekuensi logis terhadap perubahan nomenklatur kegiatan yang merupakan penjabaran program OPD seperti yang diamanatkan dalam RPJMD DIY 2017-2022.

Perubahan nama dan jenis kegiatannya telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi, bidang, dan balai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 12 program yang dijabarkan menjadi 33 kegiatan dari yang sebelumnya sebanyak 34 kegiatan. Penyandingan kegiatan-kegiatan tersebut secara singkat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6-1 Persandingan Nama Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2020

No	Nama Program	Kegiatan (2019)	Kegiatan (2020-2022)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
		Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
		Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	
4	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengkajian Lingkungan Hidup	Pengkajian Lingkungan Hidup
		Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Peningkatan Mutu Lab Lingkungan
			Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
7	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Peningkatan Tutupan Vegetasi	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS	
		Konservasi Sumberdaya Hutan	Konservasi Sumber Daya Alam
		Pengamanan Hutan	Perlindungan dan Pengamanan Hutan
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah regional	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
			Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	Penataan Hutan	Penataan Hutan
		Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan
		Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Perhutanan Sosial
10	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan
		Perlindungan Hutan	

	HUTAN LINDUNG	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan
11	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pengelolaan Tahura Bunder
		Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
		Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan

Penjabaran terkait dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 6-2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	N/A	N/A	100%	5.30 0.81 4.12 0	100%	6.37 3.12 0.00 0	100%	5.10 0.00 0.00 0	100%	6.02 7.16 1.30 0	100%	22.8 01.0 95.6 90	DLHK DIY	
		1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	12 bulan	N/A	N/A	12 bulan	1.56 3.38 8.72 0	12 bulan	1.43 5.17 3.00 0	12 bulan	1.14 8.47 7.05 1	12 bulan	1.35 7.26 5.96 8	100%	5.50 4.30 4.75 5		
						N/A	N/A	N/A	N/A	Materai (6000 & 3000) 2340 lembar & 190 lembar		Materai (6000 & 3000)		Materai (6000 & 3000)		Materai (6000 & 3000)			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terkelolanya surat masuk (12 bulan)		Terkelolanya surat masuk		Terkelolanya surat masuk		Terkelolanya surat masuk			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah (12 bulan)		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (178 unit)		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas			
						N/A	N/A	N/A	N/A			Terlaksananya penataan arsip		Terlaksananya penataan arsip		Terlaksananya penataan arsip			
										Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (12		Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (12		Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (12		Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (12			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										bulan)		bulan)		bulan)		bulan)			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (106 jenis & 57 jenis)		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pengadaan barang cetakan (31 jenis & 9 jenis)		Terlaksananya pengadaan barang cetakan		Terlaksananya pengadaan barang cetakan		Terlaksananya pengadaan barang cetakan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (32 jenis & 10 jenis)		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya penggantian/fotocopy (100.000 lembar & 20.000 lembar)		Terlaksananya penggantian/fotocopy		Terlaksananya penggantian/fotocopy		Terlaksananya penggantian/fotocopy			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pengiriman surat keluar (12 bulan)		Terlaksananya pengiriman surat keluar		Terlaksananya pengiriman surat keluar		Terlaksananya pengiriman surat keluar			
						N/A	N/A	N/A	N/A			Terlaksananya penilaian dan penyusunan arsip		Terlaksananya penilaian dan penyusunan arsip		Terlaksananya penilaian dan penyusunan arsip			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Tersedianya bahan bacaan sejumlah 2 SKH (12 bulan)		Tersedianya bahan bacaan		Tersedianya bahan bacaan		Tersedianya bahan bacaan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Tersedianya peralatan rumah tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										(46 jenis & 20 jenis)									
		2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100%	N/A	N/A	100%	3.037.577.900	100%	3.737.947.000	100%	2.991.239.800	100%	3.535.036.228	100%	13.301.801.182		
						N/A	N/A	Tersedianya jasa keamanan kantor (12 bulan)		Tersedianya jasa keamanan kantor (12 bulan)		Tersedianya jasa keamanan kantor (12 bulan)		Tersedianya jasa keamanan kantor (12 bulan)		Tersedianya jasa keamanan kantor (12 bulan)			
						N/A	N/A	Terlaksananya pengelolaan keuangan (12 bulan)											
						N/A	N/A	Terlaksananya pengelolaan kepegawaian (12 bulan)											
						N/A	N/A	Terlaksananya pengelolaan kearsipan (12 bulan)											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan			
						N/A	N/A	Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/ Non PNS/Honorer/Tidak tetap (12 bulan)		Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/ Non PNS/Honorer/ Tidak tetap (12 bulan)		Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/ Non PNS/Honorer/ Tidak tetap		Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/ Non PNS/Honorer/ Tidak tetap		Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/ Non PNS/Honorer/ Tidak tetap			
						N/A	N/A	Terlaksananya Pengelolaan Barang (12 bulan)											
						N/A	N/A	Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3				Terlaksananya Biaya Fumigasi		Terlaksananya Biaya Fumigasi		Terlaksananya Biaya Fumigasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100%	N/A	N/A	100%	699.847.500	100%	1.200.000	100%	960.283.149	100%	1.134.859.104	100%	3.994.983		
						N/A	N/A	1. Tersedianya makan dan minum rapat (12 bulan)		1. Tersedianya makan dan minum rapat (12 bulan)		1. Tersedianya makan dan minum rapat		1. Tersedianya makan dan minum rapat		1. Tersedianya makan dan minum rapat			
						N/A	N/A	2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (12 bulan)		2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (12 bulan)		2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah		2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah		2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah			
						N/A	N/A	3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (12 bulan)		3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (12 bulan)		3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah		3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah		3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
												a. 2 Kali Penilaian angka kredit b. 1 Kali Penerbitan jurnal		a. 2 Kali Penilaian angka kredit b. 1 Kali Penerbitan jurnal		a. 4 Kali Penilaian angka kredit b. 2 Kali Penerbitan jurnal			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	N/A	N/A	100%	4.11 1.45 1.50 0	100%	2.99 4.46 3.00 0	100%	5.70 0.00 0.00 0	100%	6.50 0.00 0.00 0	100%	19.3 05.9 15.1 30	DLHK DIY	
		4	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terwujudnya Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	100%	N/A	N/A	100%	902. 469. 000		751. 454. 000	100%	3.10 0.00 0.00 0	100%	1.21 1.16 1.93 7	100%	5.96 5.08 5.56 7		
						N/A	N/A	Terlaksana nya rehabilitasi gedung kantor 1 Unit						Terlaksana nya rehabilitasi gedung kantor 2 Unit		Terlaksana nya rehabilitasi gedung kantor 3 Unit			
						N/A	N/A	Terlaksana nya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP (2 paket)						Terlaksana nya rehabilitasi bangunan pendukung 2 paket		Terlaksana nya rehabilitasi bangunan pendukung 4 paket			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan 1 paket								DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan 1 paket			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembuatan Portal TAHURA Bunder 4 unit						Pembuatan Portal TAHURA Bunder 4 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder 1 unit						Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder 1 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor di Depo Arsip DLHK 92 m ²						Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92 m ² di Depo Arsip DLHK 1 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya penataan halaman						Terlaksananya penataan halaman			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										kantor 204 m ²						kantor 1 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih 1 unit						Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih 1 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penggantian papan nama gedung 6 paket						Penggantian papan nama gedung 6 paket			
						N/A	N/A	N/A	N/A			Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan 1 paket				Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan 1 paket			
						N/A	N/A							Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi		Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
														Rumah dan Gedung Kantor		Rumah dan Gedung Kantor			
		5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	100%	N/A	N/A	100%	850.000.000	100%	457.470.000	100%	300.000.000	100%	993.017.571	100%	2.600.487.571		
						N/A	N/A	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis & 3 jenis								Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis & 3 jenis			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Almari Arsip Besi 3 buah						Almari Arsip Besi 3 buah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	AC 2 PK untuk Bidang 8 unit						AC 2 PK untuk Bidang 8 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Televisi LED Untuk pengganti ruang rapat B 1 unit						Televisi LED Untuk pengganti ruang rapat B 1 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Rak 1 unit						Rak 1 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengadaan Komputer PC 17 unit						Pengadaan Komputer PC 14 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengadaan Laptop/ Notebook 3 unit						Pengadaan Laptop/ Notebook 3 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Printer Laser Jet Umum 2 buah						Printer Laser Jet Umum 2 buah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Printer Epson/ Cannon 11 buah						Printer Epson/ Cannon 11 buah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Printer Dot matrik LQ2190 2 buah						Printer Dot matrik LQ2190 2 buah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Printer IP 110 Print Portable 2 buah						Printer IP 110 Print Portable 2 buah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Printer plotter 1 buah						Printer plotter 1 buah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Printer PSC 1 buah						Printer PSC 1 buah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Meja kerja 4 unit						Meja kerja 4 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Kursi kerja 4 unit						Kursi kerja 4 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	LCD/viewer 4 unit						LCD/viewer 4 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Kamera 2 buah						Kamera 2 buah			
												peralatan dan perlengkapan gedung kantor			peralatan dan perlengkapan gedung kantor				
		6	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor	100%	N/A	N/A	100%	699.972.500	100%	644.914.000	100%	650.000.000	100%	1.399.897.116	100%	3.394.783.616		
						N/A	N/A	Terpeliharanya 11 unit Gedung Kantor & 3 unit								11 unit Gedung Kantor & 3 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perbaikan Saluran Air Bersih 1 tahun						Perbaikan Saluran Air Bersih 1 tahun			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP 2 unit						Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP 2 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Biaya pengecatan gedung aula B dan ruang arsip 725 m2						Biaya pengecatan gedung aula B dan ruang arsip 725 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan 1 unit						Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan 1 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Biaya perbaikan pintu ruangan arsip 2 unit						Biaya perbaikan pintu ruangan arsip 2 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan atap dinas induk 1 unit						Pemeliharaan atap dinas induk 1 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder 1 paket						Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder 1 paket			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder 1 unit						Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder 1 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Canopy tempat parkir 30 m2						Canopy tempat parkir 30 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan pintu kios 8 unit						Pemeliharaan pintu kios 8 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan kantor argulobang 70 m2						Pemeliharaan kantor argulobang 70 m2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembuatan ruang kearsipan 1 paket						Pembuatan ruang kearsipan 1 paket			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Tempat parkir roda 3 8 m2						Tempat parkir roda 3 8 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan pos jaga 18 m2						Pemeliharaan pos jaga 18 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan mushola 80 m2						Pemeliharaan mushola 80 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan plafon 15 m2						Pemeliharaan plafon 15 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penggantian conblok 100 m2						Penggantian conblok 100 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan Saluran air hujan 50 m						Pemeliharaan Saluran air hujan 50 m			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemasangan pagar BRC 60 m						Pemasangan pagar BRC 60 m			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Biaya pengecatan gedung 750 m2						Biaya pengecatan gedung 750 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Biaya perbaikan pintu kamar mandi 2 buah						Biaya perbaikan pintu kamar mandi 2 buah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Biaya perbaikan pintu ruangan 2 unit						Biaya perbaikan pintu ruangan 2 unit			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Biaya pemeliharaan eternit 20 m2						Biaya pemeliharaan eternit 20 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Biaya pemeliharaan dinding kaca 20 m2						Biaya pemeliharaan dinding kaca 20 m2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
												Terpeliharanya rumah dan gedung kantor		Terpeliharanya rumah dan gedung kantor		Terpeliharanya rumah dan gedung kantor			
		7	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional	100 %	N/A	N/A	100 %	1.45 6.42 0.00 0	100 %	900. 000. 000	100 %	950. 000. 000	100 %	1.95 3.60 5.29 4	100 %	5.26 0.02 5.29 4		
						N/A	N/A	185 unit kendaraan dinas operasional & 74 unit (Induk); serta Roda Empat 3 Unit dan Roda Dua 74 Unit (BALAI KPH)											
						N/A	N/A	N/A	N/A	kendaraan roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit)		kendaraan roda 2		kendaraan roda 2		kendaraan roda 2			
						N/A	N/A	N/A	N/A	kendaraan roda 3 3 unit		kendaraan roda 3		kendaraan roda 3		kendaraan roda 3			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit)		kendaraan roda 4		kendaraan roda 4		kendaraan roda 4			
						N/A	N/A	N/A	N/A	kendaraan roda 6 1 unit		kendaraan roda 6		kendaraan roda 6		kendaraan roda 6			
		8	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan	100%	N/A	N/A	100%	202.590.000	100%	240.625.000	100%	250.000.000	100%	522.318.082	100%	1.215.533.082		
						N/A	N/A	30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Jaringan Listrik 1 unit		Jaringan Listrik		Jaringan Listrik		Jaringan Listrik			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Instalasi telepon 2 unit		Instalasi telepon		Instalasi telepon		Instalasi telepon			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Jaringan internet 3 unit		Jaringan internet		Jaringan internet		Jaringan internet			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan Genset 4 unit		Pemeliharaan Genset		Pemeliharaan Genset		Pemeliharaan Genset			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan pompa air 5 unit		Pemeliharaan pompa air		Pemeliharaan pompa air		Pemeliharaan pompa air			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan pesawat telepon 15 unit		Pemeliharaan pesawat telepon		Pemeliharaan pesawat telepon		Pemeliharaan pesawat telepon			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan pemotong rumput 5 unit		Pemeliharaan pemotong rumput		Pemeliharaan pemotong rumput		Pemeliharaan pemotong rumput			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan gergaji mesin 3 unit		Pemeliharaan gergaji mesin		Pemeliharaan gergaji mesin		Pemeliharaan gergaji mesin			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan komputer /PC 65 unit		Perawatan komputer /PC		Perawatan komputer /PC		Perawatan komputer /PC			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan Note Book 40 unit		Perawatan Note Book		Perawatan Note Book		Perawatan Note Book			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan TV & Monitor 5 unit		Perawatan TV & Monitor		Perawatan TV & Monitor		Perawatan TV & Monitor			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan mesin ketik 9 buah		Perawatan mesin ketik		Perawatan mesin ketik		Perawatan mesin ketik			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan Camera 2 buah		Perawatan Camera		Perawatan Camera		Perawatan Camera			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan LCD 5 buah		Pemeliharaan LCD		Pemeliharaan LCD		Pemeliharaan LCD			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan Faximile 2 buah		Perawatan Faximile		Perawatan Faximile		Perawatan Faximile			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan elektronik Eks. Hut. 3 unit		Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.		Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.		Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBP TKP 1 unit		Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBP TKP		Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBP TKP		Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBP TKP			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan Printer 3 unit		Pemeliharaan Printer		Pemeliharaan Printer		Pemeliharaan Printer			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan TV LCD 2 unit		Perawatan TV LCD		Perawatan TV LCD		Perawatan TV LCD			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan AC 81 unit		Perawatan AC		Perawatan AC		Perawatan AC			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perbaikan AC Dinas Eks. Hut 2 unit		Perbaikan AC Dinas Eks. Hut		Perbaikan AC Dinas Eks. Hut		Perbaikan AC Dinas Eks. Hut			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan CCTV 1 unit		Pemeliharaan CCTV		Pemeliharaan CCTV		Pemeliharaan CCTV			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH 5 unit		Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH		Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH		Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Meja-Kursi Tamu 1 unit		Meja-Kursi Tamu		Meja-Kursi Tamu		Meja-Kursi Tamu			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Filling Kabinet 2 unit		Filling Kabinet		Filling Kabinet		Filling Kabinet			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Almari Sliding Kaca 1 unit		Almari Sliding Kaca		Almari Sliding Kaca		Almari Sliding Kaca			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Meja Kerja 5 unit		Meja Kerja		Meja Kerja		Meja Kerja			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Kursi Kerja 10 unit		Kursi Kerja		Kursi Kerja		Kursi Kerja			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk dan KPH)									
		9	Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan operasional dinas		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	450.000.000	100 %	420.000.000	100 %	870.000.000		
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kendaraan laboratorium lingkungan		1 mobil operasional dinas		1 kendaraan laboratorium lingkungan dan 1 mobil operasional dinas			
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang	12 bulan	N/A	N/A	12 bulan	637.773.700	12 bulan	177.267.000	12 bulan	704.009.800	12 bulan	791.708.400		2.310.753.900	DLHK DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD															
		10	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100%	N/A	N/A	100%	19.653.500	100%	18.172.000	100%	72.171.509	100%	81.161.924	100%	191.158.934		
						N/A	N/A	Tersusunnya LKJIP, konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 (3 dokumen)	19.653.500							Tersusunnya LKJIP, konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 (3 dokumen)			
										1.1 laporan LAKIP 2019		1.1 laporan LAKIP 2020		1.1 laporan LAKIP 2021		1.3 laporan LAKIP			
										2.2 laporan LKPJ dan LPPD		2.2 laporan LKPJ dan LPPD		2.2 laporan LKPJ dan LPPD		2.6 laporan LKPJ dan LPPD			
		11	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan					30.388.200		30.000.000		119.147.330		133.989.530		313.525.060		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan 19 dokumen									Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan 19 dokumen		
										1.12 Laporan keuangan Bulanan		1.12 Laporan keuangan Bulanan		1.12 Laporan keuangan Bulanan		1.36 Laporan keuangan Bulanan			
										2.2 Laporan keuangan Semester		2.2 Laporan keuangan Semester		2.2 Laporan keuangan Semester		2.6 Laporan keuangan Semester			
										3.1 Laporan keuangan tahunan gabungan		3.1 Laporan keuangan tahunan gabungan		3.1 Laporan keuangan tahunan gabungan		3.3 Laporan keuangan tahunan gabungan			
										4.4 Laporan keuangan triwulan		4.4 Laporan keuangan triwulan		4.4 Laporan keuangan triwulan		4.12 Laporan keuangan triwulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										5.1 Laporan keuangan tahunan Audited		5.1 Laporan keuangan tahunan Audited		5.1 Laporan keuangan tahunan Audited		5.1 Laporan keuangan tahunan Audited			
		12	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi					550.000.000		101.852.000		404.515.114		454.905.619		1.511.273.233		
						N/A	N/A	1.1 Kali Forum Perangkat Daerah		1.1 Kali Forum Perangkat Daerah		1.1 Kali Forum Perangkat Daerah		1.1 Kali Forum Perangkat Daerah		3 kali Forum Perangkat Daerah			
						N/A	N/A	2.1 dokumen statistik		2.1 dokumen statistik		2.1 dokumen statistik		2.1 dokumen statistik		3 dokumen statistik			
						N/A	N/A	3.2 Media Publik								2 media publik			
						N/A	N/A	4.1 dokumen Renja OPD		4.1 dokumen Renja OPD		4.1 dokumen Renja OPD		4.1 dokumen Renja OPD		3 dokumen Renja OPD			
						N/A	N/A	5.2 dokumen RKA dan DPA		5.2 dokumen RKA dan DPA		5.2 dokumen RKA dan DPA		5.2 dokumen RKA dan DPA		6 dokumen RKA dan DPA			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	6.2 dokumen RKA-P dan DPPA		6.2 dokumen RKA-P dan DPPA		6.2 dokumen RKA-P dan DPPA		6.2 dokumen RKA-P dan DPPA		6 dokumen RKA-P dan DPPA			
						N/A	N/A	7.1 dokumen ROPK		7.1 dokumen ROPK		7.1 dokumen ROPK		7.1 dokumen ROPK		3 dokumen ROPK			
						N/A	N/A			8.1 dokumen IKLH		8.1 dokumen IKLH		8.1 dokumen IKLH		3 dokumen IKLH			
		13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tersedianya Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	100 %	N/A	N/A	100 %	37.732.000	100 %	27.243.000	100 %	108.175.847	100 %	121.651.327	100 %	294.796.674		
						N/A	N/A	12 Dokumen Laporan Monev		12 Dokumen Laporan Monev		12 Dokumen Laporan Monev		12 Dokumen Laporan Monev		48 Dokumen Laporan Monev			
		14	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu		N/A	N/A	100 %	26.764.000							100 %	26.764.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
								a. Penilaian Angka Kredit 2 kali b. Penerbitan Jurnal 1 kali								a. Penilaian Angka Kredit 2 kali b. Penerbitan Jurnal 1 kali			
Meningkatkan sinergi dan efektifitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola lingkungan hidup yang berkualitas		Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)				60,51		62,44		64,18		66,15		66,15			
			Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY				44%		45%		46%		47%		47%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/ atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh pemda DIY (%)	37,5	N/A	N/A	45	1.90 4.28 4.35 0	48,75	1.09 3.24 9.00 0	52,5	3.00 0.00 0.00 0	56,25	3.25 0.00 0.00 0	56,25	2.65 8.49 1.90 0	DLHK DIY	
				Pelayanan Dokumen Lingkungan usaha/ kegiatan dan validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota (%)	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DLHK DIY	
		15	Pengkajian Lingkungan Hidup	Pelayanan Dokumen Lingkungan usaha/ kegiatan dan validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100	N/A	N/A	100	1.41 0.50 4.35 0	100	774. 800. 000	100	2.22 2.10 1.50 0	100	2.40 7.27 6.62 5	100	2.65 8.49 1.90 0		
						N/A	N/A	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten / Kota di DIY 12 Bulan		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten /Kota di DIY 12 Bulan		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten /Kota di DIY		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten /Kota di DIY		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten /Kota di DIY			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan 12 bulan		Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan 12 bulan		Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan		Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan		Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan			
						N/A	N/A	Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan 5 kab/kota		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan 5 kab/kota		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan			
						N/A	N/A	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY 1 dokumen		Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY 1 dokumen		Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY		Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY		Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
						N/A	N/A	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY 1 dokumen												
						N/A	N/A					Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY		Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY		Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY				
						N/A	N/A	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY 1 dokumen		Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY 1 dokumen		Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY		Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY		Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		16	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	37,5	N/A	N/A	45	493.780.000	48,75	318.449.000	52,5	777.898.500	56,25	842.723.375	56,25	2.658.491.900		
						N/A	N/A	Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 160 keg/usaha		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 160 keg/usaha		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan			
						N/A	N/A	Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan 20 keg/usaha		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan 20 keg/usaha		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan		Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan		Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang masuk		Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang masuk		Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang masuk			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	162	N/A	N/A	192	2.24 8.85 5.60 0	207	1.66 2.63 6.00 0	222	4.00 0.00 0.00 0	237	5.00 0.00 0.00 0	237	13.1 11.4 92.2 00	DLHK DIY	
				Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	60	N/A		72		96		120		120		120			
				Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota (usaha/keg)	55	N/A		65		70		75		80		80			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		xx	Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah	Penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) dan sumber pencemar udara (point source)	5 kab/kota	N/A	N/A	5 kab/kota	1.57 1.37 5.60 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kab/kota	1.57 1.37 5.60 0	DLHK DIY	
		17	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) dan sumber pencemar udara (point source)	5 kab/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kab/kota	1.41 1.54 4.00 0	5 kab/kota	2.79 4.97 8.20 0	5 kab/kota	3.49 3.72 2.75 0	5 kab/kota	7.70 0.24 5.55 0	DLHK DIY	
												Inventari sasi Sumber Pencemar		Inventari sasi Sumber Pencemar		Inventari sasi Sumber Pencemar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara 5 jenis (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien) 5 dokumen		Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara 5 jenis (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)		Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara 5 jenis (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)		Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara 5 jenis (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)			
										Gerakan bersih Sungai 96 lokasi		Gerakan bersih Sungai		Gerakan bersih Sungai		Gerakan bersih Sungai			
										Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) 207 usaha / kegiatan		Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)		Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)		Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)			
										Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen		Inventarisasi Gas Rumah Kaca		Inventarisasi Gas Rumah Kaca		Inventarisasi Gas Rumah Kaca			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
										Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY 5 Kab/ Kota		Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY		Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY		Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY				
		16	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 lintas kab/ kota	5 kab/kota	N/A	N/A	5 kab/kota	677.480.000	5 kab/kota	251.092.000	5 kab/kota	1.205.021.800	5 kab/kota	1.506.277.250	5 kab/kota	3.839.871.050	DLHK DIY		
						N/A	N/A	Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY 5 kab/ kota		Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY 5 kab/ kota		Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY		Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY		Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY				
						N/A	N/A	Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok		Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok		Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok		Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok		Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
								pengelola sampah 30 Kelompok		pengelola sampah 25 Kelompok		pengelola sampah		pengelola sampah		pengelola sampah			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai		Gerakan bersih pantai		Gerakan bersih pantai			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Evaluasi pengelolaan sampah mandiri 1 laporan		Evaluasi pengelolaan sampah mandiri		Evaluasi pengelolaan sampah mandiri		Evaluasi pengelolaan sampah mandiri			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	3	N/A	N/A	3	2.55 4.44 7.00 0	3	2.23 0.03 7.00 0	3	2.75 0.00 0.00 0	3	3.00 0.00 0.00 0	3		DLHK DIY	
		17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 penghargaan	N/A	N/A	3 penghargaan	1.38 3.09 0.87 0	3 penghargaan	902.310.000	3 penghargaan	1.04 7.54 1.16 5	3 penghargaan	1.14 2.77 2.18 0	3 penghargaan	4.52 5.71 4.36 5	DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
										12 kali @ 40 orang										
						N/A	N/A	N/A	N/A	Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 kali : 2 hari		Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklamasi)5 kab/kota		Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklamasi)		Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklamasi)		Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklamasi)				
						N/A	N/A	N/A	N/A			Pembinaan Laboratorium Lingkungan		Pembinaan Laboratorium Lingkungan		Pembinaan Laboratorium Lingkungan				
		xx	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	N/A	N/A	N/A	12 bulan	1.17 1.35 0.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	1.17 1.35 0.00 0	DLHK DIY		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		18	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	228.928.000	12 bulan	251.820.800	12 bulan	274.713.600	12 bulan	755.462.400	DLHK DIY	
										Dokumen Kendali Mutu Laboratorium 4 dokumen		Dokumen Kendali Mutu Laboratorium		Dokumen Kendali Mutu Laboratorium		Dokumen Kendali Mutu Laboratorium			
		19	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	1.098.799.000	12 bulan	1.320.000.000	12 bulan	1.440.000.000	12 bulan	3.960.000.000	DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi 19 parameter		Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi		Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi		Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan 1 paket		Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan		Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan		Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (ha)	150	N/A	N/A	160	14.592.323.400	165	1.828.967.000	170	6.609.536.904	175	7.170.490.595	175			DLHK DIY	
				Prosentase penurunan kerusakan hutan (%)	7,18	N/A		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1				
		xx	Peningkatan Tutupan Vegetasi	penurunan kerusakan lahan	2 kegiatan	N/A	N/A	2 kegiatan	2.580.448.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.580.448.000		DLHK DIY	
		xx	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS	Penurunan kerusakan lahan	1 kegiatan	N/A	N/A	1 kegiatan	8.942.211.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.942.211.900		DLHK DIY	
		20	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penurunan kerusakan lahan	4 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	930.307.000	4 kegiatan	5.396.161.004	4 kegiatan	5.835.777.105	4 kegiatan	12.162.246.009		DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026 1 Dokumen						Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026 1 Dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY 1 Dokumen		Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY 1 Dokumen		Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY 1 Dokumen		Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY 3 Dokumen			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penanaman Vegetasi 50 Ha		Penanaman Vegetasi		Penanaman Vegetasi		Penanaman Vegetasi			
										Rekomen dasi Pengelolaan DAS DIY									
										Data Tutupan Lahan DIY									
						N/A	N/A	N/A	N/A	1 Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY		Rekomen dasi Pengelolaan DAS DIY		Rekomen dasi Pengelolaan DAS DIY		Rekomen dasi Pengelolaan DAS DIY			
						N/A	N/A	N/A	N/A	1 Data Tutupan Lahan DIY		Data Tutupan Lahan DIY		Data Tutupan Lahan DIY		Data Tutupan Lahan DIY			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		xx	Konservasi Sumberdaya Hutan	Luas lahan terkonservasi	2 kegiatan	N/A	N/A	3 kegiatan	777.538.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	777.538.000	DLHK DIY	
		21	Konservasi Sumber Daya Alam	luas lahan terkonservasi	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kegiatan	700.000.000	3 kegiatan	941.125.900	3 kegiatan	1.038.490	3 kegiatan	2.676.364.390	DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Inventarisasi Keanekaragaman Hayati 1 dokumen		Inventarisasi Keanekaragaman Hayati		Inventarisasi Keanekaragaman Hayati		Inventarisasi Keanekaragaman Hayati			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Konservasi Daerah Tangkapan Air (10 Ha)		Konservasi Daerah Tangkapan Air		Konservasi Daerah Tangkapan Air		Konservasi Daerah Tangkapan Air			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder 60 org		Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder		Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder		Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah 10 ha		Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman		Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman		Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Panjatan		Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman		Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman Panjatan		Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman			
		xx	Pengamanan Hutan	Keamanan hutan terjamin	12 bulan	N/A	N/A	12 bulan	299.907.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	299.907.500	DLHK DIY	
		22	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	keamanan hutan terjamin	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	198.660.000	12 bulan	272.250.000	12 bulan	299.475.000	36 bulan	770.385.000	DLHK DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan 6 angkatan @ 30 orang		Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan		Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan		Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan 2 angkatan @ 25 orang		Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan		Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan		Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmoyo, Playen,		Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmoyo, Playen,		Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmoyo, Playen,		Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmoyo, Playen,			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										Paliyan, Panggang, Bantul - Kulon Progo (5 BDH)		Paliyan, Panggang, Bantul - Kulon Progo (5 BDH)		Paliyan, Panggang, Bantul - Kulon Progo (5 BDH)		Paliyan, Panggang, Bantul - Kulon Progo (5 BDH)			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengelolaan persampahan di TPA Piyungan (ton/hari)	432	N/A	N/A	600	8.74 0.00 0.00 0	660	9.50 0.00 0.00 0	720	11.0 00.0 00.0 00	780	12.0 00.0 00.0 00	780	41.2 40.0 00.0 00	DLHK DIY	
		xx	Pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah regional	Penanganan persampahan regional	432	N/A	N/A	600	8.74 0.00 0.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.74 0.00 0.00 0	DLHK DIY	
		23	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Operasi dan pemeliharaan sarpras TPA	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	1.05 0.00 0.00 0	12 bulan	1.21 5.78 9.47 4	12 bulan	1.32 6.31 5.78 9	12 bulan	3.59 2.10 5.26 3	DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA 1,2 km		Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA		Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA		Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Operasi dan Pemeliharaan		Operasi dan Pemeliharaan		Operasi dan Pemeliharaan		Operasi dan Pemeliharaan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										Jembatan Timbang 1 unit		Jembatan Timbang		Jembatan Timbang		Jembatan Timbang			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi 2 unit		Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi		Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi		Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi			
		24	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	Penanganan persampahan regional	432	N/A	N/A	N/A	N/A	660	8.45 0.00 0.00 0	720	8.81 1.55 0.00 0	780	9.61 2.60 0.00 0	780	26.4 34.6 50.0 00	DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill 10 Ha		Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill		Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill		Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA 1 unit		Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA		Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA		Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik 1 unit		Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik		Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik		Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA 35 orang		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK) 2 lokasi		Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK)		Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK)		Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK)			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengadaan Perlengkapan K3 6 jenis		Pengadaan Perlengkapan K3		Pengadaan Perlengkapan K3		Pengadaan Perlengkapan K3			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Operasi dan Pemeliharaan TPST 1 unit		Operasi dan Pemeliharaan TPST		Operasi dan Pemeliharaan TPST		Operasi dan Pemeliharaan TPST			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis. 2 dokumen						Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis. 2 dokumen			
										Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA 2 lokasi		Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA 2		Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA 2		Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA 2			
	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan		PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	Persentase kawasan hutan tertata (%)	84,12	N/A	N/A	87,4	751.573.000	89,4	915.448.000	90,68	1.100.000.000	92,32	1.250.000.000	92,32	4.017.021.000	DLHK DIY	
				Presentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat (%)	2	N/A		2		2		2		2		8			
		25	Penataan Hutan	Penataan Kawasan Hutan	3 kegiatan	N/A	N/A	4 kegiatan	314.984.000	3 kegiatan	414.000.000	3 kegiatan	385.000.000	3 kegiatan	517.950.000	3 kegiatan	1.631.934.000	DLHK DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	20 km		Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 23 km di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang		Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan		Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan		Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan			
						N/A	N/A	Penegasan Batas pada Daerah Rawan 15 titik		Penegasan Batas pada Daerah Rawan 10 titik		Penegasan Batas pada Daerah Rawan		Penegasan Batas pada Daerah Rawan		Penegasan Batas pada Daerah Rawan			
						N/A	N/A	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di 2 lokasi		Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela		Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan		Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan		Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan 2 dokumen		4. 2 Dokumen di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Klayar dan Ngingrong		Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan		Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan		Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan			
						N/A	N/A	Dokumen kajian potensi hutan rakyat 1 dokumen				Dokumen kajian potensi hutan rakyat		Dokumen kajian potensi hutan rakyat		Dokumen kajian potensi hutan rakyat			
						N/A	N/A			Pengadaan GPS mapping + antena eksternal 2 paket						Pengadaan GPS mapping + antena eksternal 2 paket			
		26	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Pengawasan tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan	12 bulan	N/A	N/A	12 bulan	126.704.000	12 bulan	102.528.000	12 bulan	290.400.000	12 bulan	319.440.000	12 bulan	839.072.000	DLHK DIY	
						N/A	N/A	Pengendalian pen atausaha an hasil hutan di 5 Kab/ Kota		Pengendalian pen atausaha an hasil hutan di 21 unit usaha		Pengendalian pen atausaha an hasil hutan		Pengendalian pen atausaha an hasil hutan		Pengendalian pen atausaha an hasil hutan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A			Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan 180 orang		Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan		Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan		Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan			
		27	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pengelolaan hutan rakyat dan perhutanan sosial	4 kab	N/A	N/A	4 kab	309.885.000	4 kab	398.920.000	4 kab	424.600.000	4 kab	412.610.000	4 kab	1.546.015.000	DLHK DIY	
						N/A	N/A	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	Pembinaan Hutan Rakyat (HR) 20 kelompok HR		Pembinaan Hutan Rakyat (HR) 20 kelompok HR		Pembinaan Hutan Rakyat (HR)		Pembinaan Hutan Rakyat (HR)		Pembinaan Hutan Rakyat (HR)			
						N/A	N/A	Fasilitasi Penyuluh Kehutanan. 60 orang		Fasilitasi Penyuluh Kehutanan. 60 orang		Fasilitasi Penyuluh Kehutanan		Fasilitasi Penyuluh Kehutanan		Fasilitasi Penyuluh Kehutanan			
						N/A	N/A	Lomba Wana Lestari 7 Kategori		Lomba Wana Lestari 7 Kategori		Lomba Wana Lestari		Lomba Wana Lestari		Lomba Wana Lestari			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pelatihan Hutan Cadangan Pangan. 4 Kab		Pelatihan Hutan Cadangan Pangan		Pelatihan Hutan Cadangan Pangan		Pelatihan Hutan Cadangan Pangan			
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Rasio pemanfaatan	86,57	N/A	N/A	86,62	8.60 2.64 3.00 0	86,64	7.52 5.51 9.00 0	86,65	7.50 0.00 0.00 0	86,66	7.98 0.00 0.00 0	86,66	31.6 08.1 63.2 00	DLHK DIY	
		xx	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Penyusunan dokumen perencanaan teknis pengelolaan hutan	3 kegiatan	N/A	N/A	3 kegiatan	414.995.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	414.995.000	DLHK DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		xx	Perlindungan Hutan	Perlindungan Hutan Terjamin	12 bulan	N/A	N/A	12 bulan	720.105.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	720.105.000	DLHK DIY	
		28	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	Penyusunan dokumen perencanaan teknis pengelolaan hutan dan reboisasi	3 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kegiatan	2.994.500	3 kegiatan	2.984.355	3 kegiatan	3.170.597	3 kegiatan	9.154.202	DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi) 1 Dokumen		Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)		Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)		Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan di 1 BDH		Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan		Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan		Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan. 24 RPH		Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan		Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan		Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Operasional pencegahan dan penanganan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan. 2 dokumen		Operasional pencegahan dan penanganan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan		Operasional pencegahan dan penanganan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan		Operasional pencegahan dan penanganan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Tanaman Kayu Putih Baru 411.600 batang		Tanaman Kayu Putih Baru		Tanaman Kayu Putih Baru		Tanaman Kayu Putih Baru			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung. 11.200 batang		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung			
		xx	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi dan Produksi Hasil Hutan	2 Komoditas	N/A	N/A	2 Komoditas	7.46 7.54 3.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Komoditas	7.46 7.54 3.00 0	DLHK DIY	
		29	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Penyusunan dokumen perencanaan teknis pengelolaan hutan	2 komoditas	N/A	N/A	N/A	N/A	2 komoditas	4.53 1.01 3.00 0	2 komoditas	4.51 5.64 7.93 5	2 komoditas	4.80 4.64 9.40 3	2 komoditas	13.8 51.3 10.6 38	DLHK DIY	
						N/A	N/A	N/A	N/A	Produksi Hasil Hutan) (minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3)		Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)		Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)		Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan Jalan Produksi 2.000 m		Pemeliharaan Jalan Produksi		Pemeliharaan Jalan Produksi		Pemeliharaan Jalan Produksi			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih 2 Unit		Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih		Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih		Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih			
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	Presentase hutan konservasi terkelola	75,21	N/A	N/A	75,86	1.573.774.500	76,62	435.862.000	76,97	950.000.000	77,09	1.100.000.000	77,09	4.059.637.250		DLHK DIY
		xx	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pengelolaan Operasional Tahura Bunder	N/A	N/A	N/A	12 bulan	179.995.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	179.995.000		DLHK DIY
		30	Pengelolaan Tahura Bunder	Pengelolaan Operasional Tahura Bunder		N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	186.000.000	12 bulan	405.402.848	12 bulan	469.413.824	12 bulan	1.060.816.671		DLHK DIY
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemantauan dan pemeliharaan		Pemantauan dan pemeliharaan		Pemantauan dan pemeliharaan		Pemantauan dan pemeliharaan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
										batas luar 13 km		batas luar		batas luar		batas luar			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman 610 batang		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 12 bulan		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pemeliharaan arboretum 5 Ha		Pemeliharaan arboretum		Pemeliharaan arboretum		Pemeliharaan arboretum			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Laporan RKL RPL Tahura 2 dokumen		Laporan RKL RPL Tahura		Laporan RKL RPL Tahura		Laporan RKL RPL Tahura			
		31	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Pengelolaan dan Perencanaan Pengembangan Pelayanan Tahura Bunder	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	1.39 3.77 9.50 0	5 kegiatan	249. 862. 000	5 kegiatan	544. 597. 152	5 kegiatan	630. 586. 176	5 kegiatan	2.81 8.82 5.57 9	DLHK DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penyebaran luasan informasi tentang Tahura Bunder		Penyebaran luasan informasi tentang Tahura Bunder		Penyebaran luasan informasi tentang Tahura Bunder		Penyebaran luasan informasi tentang Tahura Bunder			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura 6 kelompok		Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura		Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura		Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengamanan Kawasan 12 bulan		Pengamanan Kawasan		Pengamanan Kawasan		Pengamanan Kawasan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Papan nama pohon. 60 buah		Papan nama pohon		Papan nama pohon		Papan nama pohon			
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	315.000	N/A	N/A	325.000	562.148.000	330.000	513.432.000	340.000	950.000.000	350.000	1.100.000.000	1.665.000		DLHK DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		32	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat	315.000	N/A	N/A		504.508.000		365.832.000		676.896.648		783.775.067		2.331.011.715	DLHK DIY	
								Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat 325.000 btg		Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat 442.600 btg		Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat		Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat		Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat			
		xx	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	Sertifikasi bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan	315.000	N/A	N/A	325.000	57.640.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	325.000	57.640.000	DLHK DIY	
		33	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	Sertifikasi bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan	315.000	N/A	N/A	N/A	N/A	443.000	147.600.000		273.103.352		316.224.933		736.928.285	DLHK DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Penilaian kelayakan bibit/ benih/ sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar (443.000 batang bibit; 2 sumber benih)		Penilaian kelayakan bibit/ benih/ sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar		Penilaian kelayakan bibit/ benih/ sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar		Penilaian kelayakan bibit/ benih/ sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pengawasan peredaran bibit/ benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di 4 kabupaten		Pengawasan peredaran bibit/ benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku		Pengawasan peredaran bibit/ benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku		Pengawasan peredaran bibit/ benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pembinaan dan pengawasan sumber benih tanaman kehutanan (4 sumber benih)		Pembinaan dan pengawasan sumber benih tanaman kehutanan		Pembinaan dan pengawasan sumber benih tanaman kehutanan		Pembinaan dan pengawasan sumber benih tanaman kehutanan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan (15 org)		Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan		Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan		Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih (75 orang)		Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih		Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih		Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih			
						N/A	N/A	N/A	N/A	Bimbingan Teknis Pengadaan dan/ Pengedar Benih/ Bibit (20 orang)		Bimbingan Teknis Pengadaan dan/ Pengedar Benih/ Bibit		Bimbingan Teknis Pengadaan dan/ Pengedar Benih/ Bibit		Bimbingan Teknis Pengadaan dan/ Pengedar Benih/ Bibit			

Tabel 6-3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sumber Dana Keistimewaan DIY Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KESULTANAN DAN KADIPATEN								200.000.000		350.000.000		400.000.000		950.000.000		
			Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis pantai selatan kulon progo							Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai			
			Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis pantai selatan Gunungkidul							Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai			
			Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis pantai selatan Bantul									Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai 2 lokasi		Gerakan bersih pantai			

Tabel 6-4 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sumber Dana DAK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (ha)	150	N/A	N/A	160	1.99 2.21 8.00 0	165	992. 226. 250	170		175		175		DLHK DIY	
				Prosentase penurunan kerusakan hutan (%)	7,18	N/A		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1			
			Rehabilitasi hutan dan Lahan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di DIY					1.99 2.21 8.00 0		992. 226. 250		2.00 0.00 0.00 0		3.00 0.00 0.00 0				
								Sarpras Usaha Ekonomi Produktif (Bantuan sarpras dan pelatihan) 4 paket		Sarpras Usaha Ekonomi Produktif (Bantuan sarpras dan pelatihan) 2 paket	100. 000. 000	Sarpras Usaha Ekonomi Produktif (Bantuan sarpras dan pelatihan)		Sarpras Usaha Ekonomi Produktif (Bantuan sarpras dan pelatihan)		Sarpras Usaha Ekonomi Produktif (Bantuan sarpras dan pelatihan)			
								Pembuat an Gully Plug 25 unit		Pembuat an Gully Plug 4 unit	32.0 00.0 00	Pembuat an Gully Plug		Pembuat an Gully Plug		Pembuat an Gully Plug			

									Pembuat an DAM Penahan 1 unit	15.0 00.0 00										
								Pembuat an tanaman (pola pengkaya an) 160 ha	Pembuat an tanaman (pola pengkaya an) 45 ha	143. 156. 750	Pembuat an tanaman (pola pengkaya an)		Pembuat an tanaman (pola pengkaya an)		Pembuat an tanaman (pola pengkaya an)					
								Pembanu nan kantor resort KPH 1 unit di RPH sermo												
								Rehab sarpras tahura bunder 6 jenis	Rehab sarpras tahura bunder 4 jenis	701. 590. 000	Rehab sarpras tahura bunder		Rehab sarpras tahura bunder		Rehab sarpras tahura bunder					
			Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup									2.00 0.00 0.00 0		2.00 0.00 0.00 0					4.00 0.00 0.00 0	
			Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan								Sarpras Laborato rium 1 paket	2.00 0.00 0.00 0	Sarpras Laborato rium 1 paket	2.00 0.00 0.00 0	Sarpras Laborato rium 2 paket	4.00 0.00 0.00 0				

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	85,64%	n/a	91,47%	94,39%	97,02%	100%	100%
2.	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	720.236 juta rupiah	n/a	742.060 juta rupiah	749.480 juta rupiah	756.975 juta rupiah	764,545 juta rupiah	764,545 juta rupiah

BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perlu disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka untuk mengatasi kendala tersebut tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan baik. Tahap yang kedua perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras untuk pencapaian target kinerja kegiatan.

Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara optimal dan terpadu. Semoga renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.